

TARGET PESERTA AKTIF BPJS KETENAGAKERJAAN

Petugas BPJS Ketenagakerjaan melayani warga di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (12/1). BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menargetkan penambahan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang berstatus aktif secara nasional sebesar 10 juta peserta di tahun 2023 dan ditargetkan pada akhir tahun 2026 akan memiliki 70 juta peserta aktif.



FOTO: ANTARA

Dewan Nasional KEK Fokus Tingkatkan Investasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hambatan

Dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK dan KEK Likupang.

JAKARTA (IM) - Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Investasi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan KEK dan diharapkan dapat terus meningkat.

Dalam rangka mengevaluasi perkembangan pelaksanaan KEK Tahun 2022 dan rencana pada Tahun 2023, Dewan Nasional KEK mengadakan Sidang Dewan Nasional KEK.

"Terkait dengan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Yang pertama, KEK ini berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27% dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau 49% dari kumulatif tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2022, realisasi investasi adalah

Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang, dan komitmen investasinya Rp214 triliun, dimana untuk tahun 2023 komitmen investasi sebesar 61,9 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK, dilansir dari laman Kemenko Perekonomian, Kamis (12/1).

Capaian tersebut didorong oleh beberapa KEK berbasis industri seperti KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sei Mangkei dan KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Singhasari. Peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Selain itu, dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang

perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait beberapa hambatan dalam pengembangan KEK seperti masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi, diperlukannya dukungan infrastruktur dari Pemerintah, serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Lebih lanjut, Dewan Nasional KEK memberikan arahan untuk melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada dan memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan, penyesuaian regulasi, peningkatan Sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif serta menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan dukungan tersebut, diharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp214 triliun.

Pada kesempatan tersebut juga disepakati pembentukan KEK baru yaitu KEK Kura-Kura Bali (KKB) yang berlokasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Pengembangan KEK KKB dimaksudkan untuk meningkatkan pariwisata melalui pengembangan marina dan resort dengan nilai total investasi sebesar Rp104 triliun untuk 30 tahun kedepan.

Lapangan kerja baru yang akan tercipta sebanyak 35.000 orang pekerja langsung dan 64.000 orang pekerja tidak langsung serta akan menghemat devisa sebesar USD31,8 miliar. ● dro

Pupuk Kaltim Bangun Kawasan Industri Pupuk di Papua Barat

JAKARTA (IM) - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), sebagai anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia secara resmi memulai proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, mengungkapkan proyek kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak Papua Barat, telah ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini pun dikuatkan surat penugasan Pupuk Indonesia, yang menunjuk langsung Pupuk Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut.

"Pupuk Kaltim siap melaksanakan tugas ini sebagai amanah negara yang akan direalisasikan secara sungguh-sungguh untuk mendukung kedauletan pangan nasional dan perekonomian bangsa," ujar Rahmad dalam keterangan

nya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (12/1).

Seiring ditetapkan sebagai PSN, proyek kawasan industri pupuk Fakfak sangat didukung penuh oleh pemerintah pusat, karena memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap pembangunan dan perekonomian bangsa. Realisasi proyek didorong segera terlaksana sehingga misi pembangunan daerah juga terlaksana. Pupuk Kaltim memastikan untuk menjalankan tahap pembangunan pabrik secara maksimal.

Sejalan dengan semangat 45 tahun perjalanan perusahaan, Pupuk Kaltim telah mengukuhkan diri sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara yang akan terus tumbuh, melalui berbagai pengembangan dan hilirisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Proyek pembangunan kawasan industri di Fakfak merupakan salah satu pengembangan di fase

kedua pertumbuhan perusahaan, yang ditarget mampu terrealisasi dalam lima tahun ke depan.

"Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak ini menjadi program emas dalam menyongsong 50 tahun Pupuk Kaltim. Insy Allah, pada HUT Ke-50 nanti, pengantongan perdana urea di kawasan industri ini bisa terrealisasi," kata Rahmad.

Dia menegaskan Pupuk Kaltim memiliki dua modal utama dalam meningkatkan daya saing secara global, yakni kesiapan perusahaan sebagai organisasi untuk menangkap peluang melalui berbagai strategi pengembangan, dan dukungan sumberdaya profesional dan kompeten dalam mewujudkan setiap langkah strategis yang ditetapkan. Hal ini menjadi keyakinan Pupuk Kaltim untuk merealisasikan proyek kawasan industri di Papua Barat, sebagai etape pertama dalam 40 tahun kedua pertumbuhan perusahaan. ● dot



FOTO: ANTARA

TARGET PENINGKATAN PENGGUNA LAYANAN QRIS

Karyawan menata produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menggunakan layanan pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di gerai Rumah Solusi UMKM, Malang, Jawa Timur, Kamis (12/1). Bank Indonesia menargetkan sebanyak 45 juta UMKM menjadi pengguna layanan pembayaran digital QRIS pada tahun 2023.



Kemenperin Fasilitasi Sertifikat TKDN Industri Kecil

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki kebijakan strategis melalui pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi industri dalam negeri agar dapat bersaing dan memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa.

Fasilitasi sertifikat TKDN memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Hal ini termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil (IK), sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.

"Penerbitan sertifikat TKDN bagi industri kecil ini sudah semakin mudah dan tanpa biaya," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Kamis (12/1).

Reni menyebutkan, kemudahan yang diberikan berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN. "Jadi, industri kecil akan melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi aspek bahanata material langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), dan biaya untuk pengembangan," tuturnya.

Dikemukakan Reni, aturan TKDN IK bertujuan agar industri kecil dapat menjadi sasaran belanja pemerintah, BUMN dan BUMD. Tahun ini, Kemenperin menargetkan sebanyak 2 juta produk IKM dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKPP). "Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah, BUMD serta BUMN, diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri, sekaligus memberikan *multiplier effect* yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tahun ini dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor," paparnya.

Menurut Reni, fasilitasi sertifikat TKDN IK tidak hanya bermanfaat untuk menggenjot ekonomi nasional, tetapi juga memberikan benefit bagi pelaku industri kecil agar semakin naik kelas dan usahanya lebih berkembang.

"Seuai dengan arahan Bapak Presiden tentang penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM, pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25% ketika sudah terdapat produk dengan akumulasi nilai TKDN dan BMP minimal 40%," ujarnya.

Penghitungan nilai TKDN-IK dilakukan secara mandiri oleh pelaku industri kecil melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena itu, pelaku industri kecil yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN-IK diwajibkan untuk memiliki akun SIINas terlebih dahulu. Selanjutnya, industri kecil dapat melampirkan dokumen yang diperlukan terkait nilai kandungan dalam negeri untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Proses verifikasi hanya memerlukan waktu lima hari kerja dan sertifikat dapat dicetak mandiri oleh industri pemohon. "Semua proses dilakukan melalui SIINas secara daring," imbuh Reni. ● hen

Menhub Apresiasi Kinerja Maskapai Penerbangan Nasional

JAKARTA (IM) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi kinerja maskapai penerbangan nasional di tengah kondisi industri penerbangan yang mulai bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19.

"Semoga prestasi ini semakin memacu kinerja penerbangan nasional, menjadi momentum pemulihan, dan akan semakin memajukan industri penerbangan nasional," kata Menhub di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (12/1).

Budi menyampaikan, beberapa waktu lalu Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai penerbangan global paling tepat waktu sepanjang tahun 2022 (The Most Punctual Global Airline) oleh Official Airline Guide (OAG) Flightview, sebuah lembaga riset internasional yang melakukan pemeringkatan ketepatan waktu atau *on time performance* (OTP) maskapai penerbangan global.

Garuda Indonesia berhasil meraih peringkat pertama tingkat OTP sebesar 95,63 persen, mengalahkan sejumlah maskapai lainnya, di antaranya yaitu maskapai asal Afrika Selatan SaAir yang berada di peringkat kedua (95,30 persen), maskapai asal Jerman Eurowings di peringkat ketiga (95,26 persen), maskapai

asal Thailand Thai AirAsia di peringkat keempat (92,33 persen), dan maskapai asal Korsel Jeju Airlines di peringkat kelima (91,84 persen).

Ini menjadi kali kedua maskapai Garuda Indonesia meraih peringkat OTP terbaik, setelah sebelumnya diraih pada tahun 2019. Disampaikan Budi Karya, dengan capaian tersebut, diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan dari maskapai nasional. "Saya berharap kinerja ketepatan waktu yang baik ini dapat terus konsisten dilakukan dan dapat diikuti juga oleh maskapai nasional lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, selain konsistensi pelayanan dari operator penerbangan yang harus dijaga, peran serta dari masyarakat pengguna jasa penerbangan juga menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang ketepatan jadwal penerbangan.

"Manajemen waktu kedatangan di bandara harus diperhatikan, agar tidak terlalu mepet datang ke bandara. Sehingga proses pre-flight seperti *check-in* dan boarding tidak mengganggu ketepatan waktu keberangkatan pesawat," katanya. ● dot